

**PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN LANDAK DI KECAMATAN
MENYUKE TAHUN 2017**

Oleh:

FRENGKI SUPARNO ^{1*}

NIM. E1051131046

Dr. Burhannuddin Harris, M.Si², Drs. Abi Sofyan, M. Si²

*Email: frengky7899@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

Frengki Suparno: Voter Behavior in the 2017 Landak Regent and Vice Regent Election in Menyuke Sub-District.

The aim of this research is to find out voter behavior in the 2017 Landak Regent and Vice Regent Election in Menyuke Sub-District. The research method used is qualitative with descriptive research type. There are three approaches used, namely sociological approach, social psychological approach, and rational approach. Research results indicate that the sociological approach, especially the voters in Menyuke Sub-District is still much influenced by the environment, the community, and the family, as well as being influenced by the candidate's gender background. Psychological approach, especially voters in Menyuke Sub-District, refers to the voters' perception of the existing parties or the emotional attachment felt by the voters to certain candidates or parties and is a party that is always chosen without being influenced by other factors. For the rational approach, especially voters in Menyuke Sub-District, is influenced by the profit and loss factors obtained by the voters themselves. They assume that choosing candidates based on their shared tribe will result with that tribe being prioritized.

Keywords: Voter Behavior, Election, Sociological Factor, Psychological Factor, Rational Factor

ABSTRAK
VOTER BEHAVIOR IN THE 2017 LANDAK REGENT AND
VICE REGENT ELECTION IN MENYUKE
SUB-DISTRICT

By:

RENGKI SUPARNO ^{1*}

NIM. E1051131046

Dr. Burhannudin Harris, M.Si², Drs. Abi Sofyan, M.Si²

*Email: frengky7899@gmail.com

1. College Student of Political Sciences Study Program Faculty of Social and Political Sciences at Tanjungpura University.
2. Lecturer of Political Sciences Study Program Faculty of Social and Political Sciences at Tanjungpura University.
- 3.

ABSTRAK

Frengki Suparno: Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di Kecamatan Menyuke Tahun 2017.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku pemilih pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Di Kecamatan Menyuke. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis sosial, dan pendekatan rasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis khususnya masyarakat pemilih di Kecamatan Menyuke masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, masyarakat, dan keluarga, serta di pengaruhi latar belakang jenis kelamin kandidat. Pendekatan psikologis pemilih masyarakat khususnya pemilih di Kecamatan Menyuke konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional yang dirasakan oleh pemilih pada calon maupun pada partai tertentu yang dirasakan sangat dekat dengannya dan merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dan Sedangkan pendekatan rasional, pemilih masyarakat Kecamatan Menyuke khususnya memilih kandidat karena dipengaruhi oleh faktor untung rugi yang didapatkan oleh pemilih itu sendiri, mereka beranggapan bahwa kesamaan suku akan mendapatkan prioritas dari calon yang mereka pilih karena adanya kesamaan suku dan juga mereka beranggapan bahwa mereka akan di perhatikan lebih oleh pemerintah yang memiliki kesamaan golongan tersebut.

Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Pilkada, Faktor Sosiologis, Faktor Psikologis, Faktor Rasional

A. PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai bagian dari demokrasi dalam politik mempunyai peran dalam kemajuan bangsa. Pentingnya peran masyarakat khususnya Kecamatan Menyuke, memiliki peran dan fungsi yang strategis dslnm skselerasi pembangunan termasuk pula dalam kehidupan berbangsa dan Negara. Baik dan buruknya suatu Negara dilihat dari pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan Negara. Khususnya Kecamatan Menyuke harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan Negara, memiliki kepribadian yang tinggi, dan semangat nasionalisme.

Peran masyarakat khususnya, masyarakat Kecamatan Menyuke dalam bidang politik tidaklah hanya semata-mata sebagai pengaruh melainkan harus berperan aktif dalam dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan dan keseimbangan daerah atau Negara, mempunyai hak menjadi pemimpin, juga berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Budiarjo (2008:367) mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dlam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kebebasan berbicara, berpendapat dan juga kebebasan berserikat. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung yang merupakan salah satu bentuk demokrasi. Dimana rakyat juga memiliki peran dalam suksesnya sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam pemilu rakyat membuat sebuah kontrak sosial lewat perwakilannya untuk mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah melalui pemilu, seperti misalnya pemilihan

kepala daerah dan pemilihan legislatif.

Berbicara tentang pemilihan umum secara langsung, maka tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai mana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016perubahan kedua atas undang-undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang yang membahas Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) yang telah di laksanakan pada tanggal 15 february 2017 secara langsung Dalam Undang-Undang (UU) terkait Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ditegaskan, bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan di antaranya: a. Berpendidikan paling rendah sekolah

lanjutan tingkat atas atau sederajat; b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, dan 25 (dua puluh lima) tahun, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; c. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan d. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota dan ini menjadi landasan hukum untuk maju menjadi calon kepala daerah.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak sudah berlangsung beberapa kali. Namun pemilihan kali ini sangat menarik karena hanya diikuti oleh satu pasangan atau calon saja yaitu pasangan Dr. Karolin Margaret Natasya dan Herkulanus Hariyadi. SE melawan kotak kosong.

Hal tersebut diakomodir dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Regulasi ini mengakomodir keberadaan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan. Misalnya, pasangan calon tunggal diperbolehkan apabila KPU telah melakukan perpanjangan pendaftaran, namun tetap saja tidak ada calon lain yang mendaftar. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati DI Kabupaten Landak pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2017 yang diikuti oleh satu pasangan calon saja.

Pasangan nomor urut satu Dr. Karolin Margret Natasa-Herculanus Heriadi, SE diusung oleh sembilan partai politik yang masing-masing memiliki kursi di DPRD Landak itu yakni, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKPI, PKB, PAN dan Partai Hanura. dimana hampir seluruh partai yang berada di Kabupaten Landak mendukung dan mengusung pasangan Dr. Karolin Margret Natasa Herculanus Heriadi, SE, dan hanya Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) saja yang hanya memiliki satu kursi di DPRD Kabupaten Landak tidak menyatakan sikapnya terhadap pasangan Dr. Karolin Natasa dan Herculanus Heriadi. SE hingga berakhirnya proses deklarasi dan pendaftaran di KPU Kabupaten Landak.

Ini merupakan kali pertama di Kabupaten Landak dimana pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu pasangan Dr. karolin Margaret Natasya dan Herkulanus Hariyadi. SE. Hal tersebut diakomodir dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang pembaharuan kedua atas undang-undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang-undang Pilkada. Regulasi ini mengakomodir keberadaan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan. Misalnya, pasangan calon tunggal diperbolehkan apabila KPU telah melakukan perpanjangan pendaftaran, namun tetap saja tidak ada calon lain yang mendaftar. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati DI Kabupaten Landak pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2017 yang diikuti oleh satu pasangan calon saja yaitu Dr. Karolin Mrgaret Natasa dan Herculanus Heriadi. SE.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti melihat masih ada beberapa kecamatan yang jumlah memilih kotak kosong masih sangat banyak di antaranya ada dua kecamatan yang tertinggi yang memilih kotak kosong antara lain Kecamatan Ngabang yaitu dengan jumlah 1.698 suara, dan di Kecamatan Menyuke yaitu dengan jumlah 1.130 suara kotak kosong. Jadi total suara yang di peroleh pasangan Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi di seluruh daerah di Kabupaten Landak. Adalah 227.531 suara sedangkan yang memilih

kotak kosong yaitu berjumlah 7.385 di seluruh Kecamatan. Jadi total suara sah adalah 28.390 suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Landak Tahun 2017. penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Pada Tahun 2017 di Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Landak Tahun 2017 di Kecamatan Menyuke.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pemilihan umum (*general election*) diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintah secara berkala. Dikebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, dianggap bisa mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat dalam menentukan arah politiknya.

Didalam wacana ilmu politik, menurut Gaffar (dalam Sitepu, 999:255) mendefinisikan pemilihan umum dapat diartikan suatu kumpulan atau metode atau cara warganegara atau masyarakat memilih para wakil mereka, dan juga pemilihan umum adalah sebuah proses dengan manakala sebuah lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) dipilih dengan berdasarkan sistem pemilihan umum yang mentransfer sejumlah suara kedalam sejumlah kursi, seperti misalnya dalam pemilihan Presiden Gubernur atau Bupati.

Menurut Anwar (dalam Kamarudin, 2006:39) menjelaskan “pemilihan umum adalah pasar politik tempat

individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak social (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih”. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat seara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, relasi, komunikasi masa lobi dan lain-lain.

Menurut Rabi’ah (dalam Efriza, 2012:360) pemilu sebagai suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Sedangkan menurut Endrew Reynolds, pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dalam kandidat.

Pemilihan umum dijelaskan oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Seta Walikota Dan Wakil Walikota seara langsung dan demokrasi.

Perilaku pemilih merupakan tinggkah laku seseorang dalam menentukan pilihan yang dirasa paling di sukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku pemilih di kategorikan dalam dua kubu yaitu mazhab Colombia dan mazhab Michigan (2003:201). Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam bentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu.

Menurut Surbakti (1992-145-145) perilaku pemilih memiliki hubungan erat dengan pemilih itu sendiri dalam

menjatuhkan pilihan politiknya. Mengapa pemilih menjatuhkan pilihan politik kepada calon kepala daerah tertentu? Dalam pemilihan politik pemilihan yang satu belum tentu sama dengan pilihan politik yang lain. Jawaban atas pertanyaan itu dibedakan menjadi lima sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.

Perilaku politik adalah perilaku yang berkaitan dengan proses politik. Yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.

Perilaku politik adalah perilaku yang berkaitan dengan proses politik. Yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.

Menurut surbakti, (2010:169) interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik dan pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik adalah proses timbal balik dalam suatu Negara antara pembuatan keputusan dengan warga Negara biasa yang bertindak sebagai pihak yang hanya dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik tersebut.

Perilaku politik adalah kegiatan-kegiatan yang memiliki hubungan-hubungan dengan politik, atau disebut kegiatan politik. Oleh karena itu, perilaku politik dibagi dua, yakni perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, dan perilaku politik warga Negara biasa. Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Kegiatan politik lembaga-lembaga pemerintah dan

lembaga-lembaga politik tersebut adalah bertanggung jawab atas wewenang proses politik, sedangkan kegiatan politik warga nega biasa adalah partisipasi politik.

Jika dikaitkan dengan pemilu, warga Negara biasa memiliki andil dalam proses pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap masadepan negaranya dan warga Negara lainnya. Perilaku politik dalam pemilu selanjutnya disebut perilaku pemilih. Karena warga Negara biasa memiliki hak untuk memilih dan hak untuk tidak menjatuhkan hak pilihan politiknya. Warga Negara biasa, aktivis politik, elit politik, dan aktor politik itu sendiri merupakan model perilaku politik dengan unit analisis

individu aktor politik. Dalam hal ini perilaku politik dipengaruhi oleh pelaku-pelaku politik itu sendiri. Agregasi adalah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan dan lembaga-lembaga pemerintahan. Dan tipologi kepribadian pemimpin politik yang dapat bersifat otoriter dan demokratis.

Pemilih terbagi beberapa segmen tipe, yakni pemilih rasional, kritis, tradisional, dan skeptis (Firmansah, 2008:119):

1. Pemilih rasional pada dasarnya menjadikan orientasi kandidat atau partai sebagai penentu dalam memutuskan pilihannya, dimana kemampuan dan program kerja yang ditawarkan, serta prestasi yang telah dicapai oleh kandidat atau partai yang diutamakan.
2. Pemilih kritis juga berorientasi pada kemampuan kandidat atau calon dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat, namun masih mempertimbangkan ikatan ideologis yang menjadikan loyal terhadap partai atau kandidat tertentu.
3. Pemilih tradisional yang menentukan pilihan berdasarkan kedekatan sosial budaya, nilai, asal-usul, agama, dan biasanya mengutamakan figur atau

ketokohan, kepribadian dan nilai-nilai historis kandidat atau partai.

4. Pemilih skeptis yakni pemilih yang memiliki minat rendah terhadap politik secara umum atau mereka yang termasuk golongan putih (golput)

Menurut Newman (dalam Nursal, 2004:126) mengelompokkan pemilih menjadi empat segmen berdasarkan perilaku, yaitu:

- a. Segmen pemilih rasional, kelompok pemilih yang memfokuskan perhatian pada factor isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan pilihannya.
- b. Segmen pemilih emosional, kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu seperti kesedihan, kekhawatiran dan kegembiraan terhadap harapan ruangan tertentu dalam menemtukan pilihan politiknya.
- c. Segmen pemilih social, kelompok yang mengsosialisasikan kontestan politiknya.
- d. Segmen pemilih situasional, kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional tertentu dalam menentukan pilihan. Segmen ini digerakan oleh perubahan dan akan menggeser pilihan politiknya jika terjadi kondisi-kondisi tertentu.

Perilaku pemilih memiliki hubungan erat dengan pemilih itu sendiri dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Mengapa pemilih menjatuhkan pilihan politik kepada calon kepala daerah tertentu? Dalam pemilihan politik pemilih yang satu belum tentu sama dengan pilihan politik pemilih yang lain. jawaban atas pertanyaan itu dibedakan menjadi lima sesuai dengan pendekatan-pendekatan

yang digunakan yakni, sosiologis, ekologis, psikologis social, dan pilihan rasional (Surbakti, 2010:186-187)

Pendekatan structural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan sistem yang ditonjolkan oleh setiap calon kepala daerah. Struktur sosial menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antar majikan dan pekerja, agama, basis sosial sistem partai dan program-program yang di tonjolkan mungkin berbeda dari suatu negara lain karena struktur social tersebut.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pemilih seseorang dalam pemilihan umum di pengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (desa-kota), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit territorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kalau di amerika serikat terdapat *distrik, precinct, dan ward*. Kelompok masyarakat seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit toritorial, dapat dijadikan dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum. Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data hasil pemilihan umum untuk tingkat provinsi berbeda dengan berbeda dengan karakteristik data kabupaten, atau karakteristik data kabupaten berbeda dengan karakteristik data tingkat kecamatan.

Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau kerikatan emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih kegiatan memilih sebagai produk kalkulus untung rugi. Yang di pertimbangkan tidak hanya di "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai kepala daerah. Bagi pemilih pertimbangan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

menurut Denis Kavanagh (dalam jurnal Indar Melani, 2014:14) menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologis sosial, dan pilihan rasional.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal (desa-kota), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Pendekatan sosiologis secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis, dikembangkan oleh ilmuwan politik dan dari Universitas Columbia, pendekatan ini juga dikenal juga dengan sebutan *Mazhab Columbia*.

Sementara model penjelasan makrososial menelaah perilaku pemilih, hal mana pada akhirnya melahirkan suatu penjelasan mengenai terbentuknya sistem partai di Eropa Barat

Menurut Lazarfeld (dalam Efriza 2012:56) dalam pendekatan ini, bahwa seseorang memilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan seseorang memilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri, sebab setiap orang ingin hidup tentram tanpa bersitenggang dengan lingkungan sosialnya.

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang berkaitan dalam memnetukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas, kedudukan, ideologi dan sejenisnya di anggap mempunyai peran dalam menentukan perilaku pemilih. Diantara sarjana yang melakukan penelitian dan pendekatan Gerald Pomper dan Lipset (dalam jurnal Melani, 2014:25) Pomper melakukan penelitian hubungan antara predisposisi sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih.

Menurutnya, predisposisi sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya preferensi-preferensi politik keluarga, apakah prefensi politik ayah, atau prefensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak, prefensi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya.

Jadi, menurut pandangan-pandangan dalam pendekatan sosiologis ini, faktor

eksternal sangat dominan dalam membentuk kondidi sosial yang membentuk perilaku politik dari luar melalui nilai-nilai yang di tanamkan dalam proses sosial yang dialami individu seumur hidupnya. Ada beberapa kritik dalam pendekatan sosiologis ini yaitu kenyataannya bahwa perilaku pemilih tidak hanya satu tindakan kolektif tetapi merupakan tindakan individual. Dapat saja seseorang dijejaki dengan berbagi norma sosial yang berlaku, tetapi tidak ada jaminan bahwa ketika akan memberikan suara. Individu tersebut tidak akan menyimpang dari norma dan nilai yang dimilikinya. Selalu ada kemungkinan kelomponya ketika dia akan melakukan tindakan politik (Roth, 2018:23-26).

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu dan tema. Pertama, idntifikasi partai digunakan untuk mengatur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik seperti pengalaman pribadi ataupun orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.

Pendekatan sosiologis sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik, sebagaimana dijelaskan diatas. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau ketertarikan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Kongkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Pendekatan psikologis lebih menitik

beratkan konsep sosialisasi dan sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku memilih, daripada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini para pemilih memnetukan pilihanya terhadap seseorang kandidat karena produk dari “sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik merka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih”. Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis sebagai kajian utama, yakni ikatan emosional pada satu parpol, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat.

Sementara itu, evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam masalah kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indicator yang bisa dipakai oleh para pemilih untuk memilih seseorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integritas.

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan berkebang setelah memperoleh konsesnsus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Salah satu tokoh penting yang mengagas pendekatan ini adalah V.O.Key (dalam jurnal Melani, 2014:28) menurut key, yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya.

Key melihat kecenderungan masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara *retrospektif*, yaitu dengan menilai

apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa (bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tidak akan dipilih kembali.

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Kelima pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang, perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh kelima pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. Huntington dan Nelson (dalam jurnal Melani, 2014:29) menjelaskan mengenai spektrum partisipasi politik tersebut. Menurut mereka, ada dua jenis partisipasi politik yang bergerak pada satu garis spektrum yaitu :

Partisipasi otonom adalah jenis partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Pada jenis ini, keterlibatan

masyarakat dalam memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang suatu hal pada pemerintah, mendirikan partai politik, menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada pemilihan umum, dan sebagainya.

Partisipasi yang dimobilisasi lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain sangat signifikan terhadap partisipasi individu atau kelompok.

Dalam bahasa Loekman soetrisno disebutkan, "kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah." karena partisipasi politik memiliki sifat spectrum, justifikasi, bahwa ada dua kubu yang saling bertentangan adalah tidak benar pengertian yang tepat dalam konteks tersebut bahwa masyarakat lebih efektif apabila diperintah dengan cara dimobilisasi, tetapi pada saat lain, partisipasi otonom bisa berbalik secara drastic menuju partisipasi yang dimobilisasi.

Isu-isu kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, sekelompok bisa saja memilih sebuah partai atau kandidat politik karena dianggap sebagai representasi dari agama atau keyakinan tetapi kelompok yang lain memilih karena partai atau kandidat tertentu dianggap representasi dari kelas sosialnya. Ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal atau pada figur tokoh tertentu Nursal (2004:53)

Nursal (2004:72) menyimpulkan beberapa indikator yang mempengaruhi perilaku politik yaitu:

a. *Social imagery* atau citra social (pengelompokan social)

Pengelompokan sosial berada dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau

- kandidat politik.
- b. **Identifikasi partai**
Identifikasi partai yakni proses panjang sosialisasi kemudian berbentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi keasyarakatan yang lainnya. Dengan identifikasi partai, seolah-olah semua relatif mempunyai pilihan yang tetap, dari pemilu ke pemilu, seseorang selalu memimpin partai atau kandidat yang sama.
 - c. **Emotional feeling** (perasaan emosional)
Emotional feeling adalah dimensi emosional yang terpancar dari seseorang kontestan atau kandidat yang di tunjukan oleh policy politik yang di tawarkan.
 - d. **Candidate personality** (citra kandidat)
Candidate personality mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat, beberapa sifat yang merupakan candidate personality artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegar dan sebagainya.
 - e. **Issue and policies** (isu dan kebijakan politik)
Komponen *issue and policies* mempresentasikan kebijakan atau program yang di janjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang pemilu. Platform yang sering ditawarkan oleh kandidat pemilu kepada pemilih adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan social, kebijakan politik dan kebijakan keamanan, kebijakan hukum dan karakteristik kepemimpinan.
 - f. **Current event** (peristiwa mutakhir)
Current event mengacu pada himpunan peristiwa, isu dan kebijakan menjelang selama kampanye. *Current event* meliputi masalah domestic dan luar negeri yang termasuk dalam masalah

inflasi, prediksi ekonomi, geakan separatism, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi, dan seagainya.

- g. **Personal event** (peristiwa personal)
Personal event mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah di alami secara pribadi oleh seorang kandidat.
- h. **Epistemic issues**
Epistemic issues adalah isu-isu pilihan yang dapat memicu keinginan pemilih mengenai hal-hal baru.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan, yakni penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Nawawi, 2005:31). Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki.

Dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada waktu atau saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku pemilih pemula yang diamati. Dengan demikian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode yang berusaha mendeskripsikan data atau informasi yang di temukan dilapangan dengan menganalisanya.

2. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua langkah penelitian yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Studi Kepustakaan

Upaya menemukan pendapat, perspektif dan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku politik, melalui penelitian pustaka ini, peneliti

memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah bahan tertulis seperti buku-buku teks, jurnal, literatur, dokumen pemerintah serta arsip-arsip lainnya.

2. Penelitian Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini adalah aktivitas turun lapangan yang dilakukan secara intensif untuk berhubungan dengan subjek maupun objek penelitian dengan maksud agar dapat merekam seluruh fenomena dan informasi yang dibutuhkan bagi penulis dalam laporan penelitian.

Dalam prosesnya peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mencari hasil penelitian terdahulu dan berbagai buku yang relevan dengan teori-teori yang penulis gunakan. Setelah itu barulah peneliti melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mencari dan mengumpulkan informasi dan fakta yang di perlukan dalam penulisan dengan alat pengumpul data yang telah di siapkan.

3. Objek Dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perilaku pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Landak di kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Tahun 2017.

b. Subjek Penelitian

Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* menurut Sutopo (1992:22) "Dimana peneliti cenderung memilih responden secara variatif berdasarkan alasan. Namun demikian responden yang dipilih dapat menunjuk responden lain yang lebih tahu, maka pilihan responden dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandapan penelitian dalam pengambilan data penelitian." Penentuan ini peneliti terapkan untuk menentukan responden yang tahu persis persoalan yang menyangkut

permasalahan penelitian, yaitu tentang perilaku pemilih Masyarakat terhadap pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Landak tahun 2017. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemilih di Kecamatan Menyuke pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Landak tahun 2017
 - b. Anggota KPUD Kabupaten Landak
 - c. Staf Kantor Kecamatan Menyuke
 - d. Tokoh Masyarakat
- ## 4. Instrument penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian biasanya menggunakan alat atau instrumen untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian. Data yang di kumpulkan berupa yang valid dan akurat bukan data yang sembarangan.

Menurut Arikunto (2000:134), instrumen pengumpulan data adalah alat yang di pilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan di permudah olehnya.

Adapun alat atau instrumen yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian yaitu:

1. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang telah penulis susun berdasarkan permasalahan. Pertanyaan ini berkembang sesuai dengan responden dilapangan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon (Sugiyono, 2006:138-140). Pedoman wawancara ini adalah sebagai pegangan bagi penulis, sehingga lebih terarah.
2. Dokumentasi, yaitu untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, buku-buku serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu: wawancara dan dokumentasi

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Stedward (dalam Harrison, 2009:104) “wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum di kaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.”

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan kontruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang.

Teknik wawancara yang di gunakan peneliti disini tidak dilakukan secara ketat dan terstruktur, tertutup, dan formal, tetapi lebih menekankan pada suasana akrab dengan mengajukan pertanyaan terbuka.

Cara pelaksanaannya wawancara yang lentur dan longgar ini mampu menggali dan menangkap kejujuran informasi di dalam memberikan informasi yang sebenarnya. Hal ini semakin bermanfaat bila informasi yang diinginkan berkaitan dengan pendapat.

b. Studi Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film yang dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik (Moleong, 2007:216). Sesuai dengan pengertian tersebut metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perilaku pemilih Terhadap Calon Tunggal dalam Pemilihan Buapti Dan Wakil Bupati Kabupaten Landak tahun 2017 di kecamatan Kuala Behe dan literatur-literatur pendukung lainnya.

Instrumen atau Alat Pengumpulan Data

Instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Namun setelah fokus masalah itu jelas maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana untuk dapat melengkapi data. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya peneliti memerlukan beberapa alat bantu yakni alat bantu rekam (*Tape Recorder*), buku catatan, dan kamera sebagai alat dokumentasi, serta pedoman wawancara.

3.7 Teknik Analisis Data

Patton (dalam Hasan, 2002:97) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Milles dan Huberman (1992:20) data di analisis dan diolah dengan cara:

- 1) Pengumpulan data, pengumpulan data. Dengan mencari data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber di lapangan yang mendukung penelitian ini.
- 2) Reduksi data, reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyerdehaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang munculdari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan di verivikasi.
- 3) Penyajian data, penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- 4) Menarik kesimpulan atau verifikasi, adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat di tinjau sebagai makna yang muncul data yang harus di uji kebenarannya, kekokohnya yaitu merupakan validitasnya.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji data yang di peroleh dalam penelitian itu sah dan benar maka di perlukan uji kredibilitas pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Maleong (2007:330) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Mengeek kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi metode, menurut patton, (dalam Maleong, 2007:331) terdapat dua strategi untuk melakukan triangulasi metode yaitu:

- 1) Pengecekan drajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data
- 2) Pengecekan drajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama

Denzim (dalam Maleong, 2007:332) membedakan empat macam triangulasi di antaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini, dari empat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber yang dipercaya itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan nya sepanjang waktu

- d) Membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui arah pemilih lebih kemana dan untuk mengetahui alasan pemilih menjatuhkan pilihan terhadap bupati dan wakil bupati. Ada beberapa pendekatan yang di lihat Menurut Ramlan Surbakti (1992:145) perilaku pemilih memiliki hubungan erat dengan pemilih itu sendiri dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Mengapa pemilih menjatuhkan pilihan politik kepada calon kepala daerah tertentu? Dalam pemilihan politik pemilihan yang satu belum tentu Sama dengan pilihan politik yang lain. Jawaban atas pertanyaan itu dibedakan menjadi lima sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pemilih seseorang dalam pemilihan umum di pengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (desa-kota), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Menurut Lazarfeld (dalam Efriza 2012:56) dalam pendekatan ini, bahwa seseorang memilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan dan, usia dapat mempengaruhi keputusan seseorang pemilih. Setiap lingkungan sosial memiliki normanya sedniri dan kepatuhan terhadap norma itu menghasilkan sebuah integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri, sebab setiap orang ingin hidup tentram tanpa

bersitenggang dengan lingkungan sosialnya.

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang berkaitan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas, kedudukan, ideology dan sejenisnya dianggap mempunyai peran dalam menentukan perilaku pemilih.

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang berkaitan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas, kedudukan, ideology dan sejenisnya dianggap mempunyai peran dalam menentukan perilaku pemilih.

Konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain Pendekatan psikologis sosial ini penting sekali digunakan karena karakteristik data hasil pemilihan umum untuk tingkat provinsi berbeda dengan berbeda dengan karakteristik data kabupaten, atau karakteristik data kabupaten berbeda dengan karakteristik data tingkat kecamatan.

Dalam pendekatan psikologis sosial isu-isu tentang relevansi dan nuansa religious, serta eksistensi partai dan calon, merupakan pilihan bagi banyak masyarakat di lingkungan sosial pemilih tersebut calon dengan kehidupan masyarakat sangat berpengaruh. Dikatakan mereka menjatuhkan pilihannya dengan mengedepankan siapa calon itu dan bagaimana kehidupan serta sikap calon itu

secara moral didalam lingkungan sosial masyarakat dan isu-isu, dan jaji jani yang dibawa calon serta ikatan religious calon dengan pemilih.

Pemikiran rasional mereka yang berpikir bahwa calon yang mereka pilih mampu untuk berkontribusi terhadap keinginan mereka, mereka yakin dengan pilihan mereka bahwa mereka mendapatkan suatu keuntungan dengan menjatuhkan pilihan mereka pada calon mereka. Hal ini menunjukkan adanya untung rugi yang di fikirkan oleh pemilih dalam menjatuhkan pilihan politik nya.

Adanya sifat religious yang baik yang ada pada calon, serta janji yang di buat calon para timses yang membuat pemilih menjatuhkan pilihannya pada calon terpilih. Kedekatan ekologis ini lah yang dijadikan tolak ukur pelaku pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. Karena pemilih mengenal secara dekat dan mengetahui latar belakang calon jadi masyarakat menjatuhkan pilihannya tidak mempertimbangkan atas loyalitas dan kemampuan serta kesiapan calon dalam memimpin. Mereka lebih melihat siapa calon itu, dan apa saja isu, janji dan seberapa banyak orang di sekitarnya memilih calon tersebut, sehingga mempengaruhi pemilih yang satu dengan yang lainnya untuk menjatuhkan pilihannya pada calon tersebut.

Pemilih rasional ini lebih memilih bagaimana mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Mereka memperhatikan pada dinamika ekonomi politik sehingga asumsi perilaku politik mereka lebih dibentuk atas keadaan ekonomi mereka. Hal yang paling mendasar bagi pemilih model ini untuk menjatuhkan pilihannya ialah pada calon yang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasar mereka dan lebih bisa memberi keuntungan bagi mereka yaitu dengan prinsip bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos yang minimal.

Pemilih ini juga bisa bersifat

menguntungkan dan merugikan bagi calon tertentu karena jika calon tidak dapat memenuhi janji-janjinya pada saat berkampanye bukan tidak mungkin masyarakat tidak akan lagi mau percaya dengan pemerintah dan akan mempersulit juga kemungkinan terpilih jika kembali mencalonkan diri karena masyarakat sudah tidak mau percaya lagi dengan janji-janji yang telah mereka buat atau katakana. Selama ini masyarakat Kecamatan Menyuke merasa di anak tirikan dengan pembangunan-pembangunan yang di lakukan pemerintah karena mereka sangat kurang merasakan pembanguan insfratraktur baik dari segi jalan maupun ir bersih bahkan mereka sudah sering mengajukan proposal untuk perbaikan jalan dan pengadaan air bersih dikampung mereka namun belum juga ada tanggapan dari pemerintah.

Itu lah yang membuat masyarakat banyak yang lebih memilih menjatuhkan pilihan mereka ke kotak kosong itu sebagai bentuk protes, serta kekecewaan masyarakat di Kecamatan Menyuke terhadap pemerintah karena mereka merasa di jadikan objek untuk mendapatkan suara masyarakat dengan janji-janji yang

Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang di pertimbangkan tidak hanya di "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai kepala daerah. Bagi pemilih pertimbangan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Dalam peneltian ini pemilih melakukan tindakan politiknya berdasarkan pemikiran sendiri yang yang secara cerdas, rasional dan objektif tanpa

terpengaruh dan terbelenggu oleh faktor sosiologis maupun ekologis. disini pemilih lebih menekankan pada melihat pada kesiapan para calon dalam menjalankan visi dan misi nya, seta tidak menjatuhkan pilihan politik nya karena adanya hasutan atau intervensi dari pihak lain dan juga bukan karna imbalan-imbalan yang di berikan atau di janjikan oleh calon bupati dan wakil bupati. ketika mereka memenangkan kompetisi tersebut. Pemilih lebih bisa menganalisis sendiri tentang calon yang akan mereka pilih serta janji yang ditawarkan. pendekatan ini lebih menekankan pada kebebasan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya untuk menggunakan akal yang cerdas, memilih calon yang mempunyai kreadibilitas, kualitas serta loyalitas kerja tanpa terinterpensi kesamaan pandangan atau kedekatan sesama.

Dengan kesadaran serta pendidikan yang memadai seseorang lebih bisa mengambil sikap politik secara rasional, secara objektif melihat kemampuan serta kesiapan calon dalam menjalankan visi dan misinya bukan karna ada hasutan atau intervensi dari pihak lain

merekabuut supaya memilih mereka namun nyatanya masyarakat disana banyak mengalami kekecewaan daripada janji-janji para calon pemimpin saat berkampanye dei daerah mereka.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Menyuke ada sebagian yang terpengaruh dengan faktor sosiologis namun ada juga yang tidak terpengaruh dengan faktor sosiologis tersebut, mereka tidak menjatuhkan pilihan ke calon tertentu karen sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahaan sebelumnya maupun yang akan datang, mereka memilih

berdasarkan hati nurani mereka bukan lagi berdasarkan pada ikatan agama, suku, dan ras.

2. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Dalam perilaku politik psikologis sosial ini perilaku pemilih lebih menekankan pada tingkat emosional pemilih dengan partai, perilaku ini lebih menekankan pada sifat fanatisme pemilih terhadap suatu partai pengusung calon tersebut. Sehingga lebih besar kemungkinan si pemilih untuk menjatuhkan pilihan karna rasa emosional nya terhadap partai itu. Perilaku ini lebih kuat pengaruhnya terhadap pemilih yang memiliki tingkat emosional yang tinggi terhadap partai pengusung.
3. pendekatan rasional ini lebih mengarah pada pemikiran politik si pemilih, karena perilaku ini menempatkan dimana si pemilih mulai berfikir rasional untuk menjatuhkan pilihan politik nya terhadap calon yang akan di pilihnya, yang dimana pemilih ini bukan berpandangan pada faktor agama, ras, maupun suku, serta jabatan, sosial-ekonomi calon, dan tingkat pendidikan calon. Melaikan pemilih rasional ini menjatuhkan pilihannya berdasarkan visi dan misi calon, apakah visi dan misi calon tersebut lebih mengarah pada kehidupan sosial masyarakat nya serta pemilih mendapatkan sebuah keuntungan terhadap pilihan politiknya. Namun ada juga pemilih yang menjatuhkan pilihannya karna

adanya ikatan kekeluargaan dan fanatisme mereka terhadap suatu partai.

6.2. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memilih masyarakat Kecamatan Menyuke dalam menentukan pilihan politiknya ketika Pilkada di Kabupaten Landak tahun 2017 sebaiknya didasarkan pada hati nurani bukan berdasarkan pengaruh dari keluarga maupun pengaruh dari kelompok lainnya.
2. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Menyuke perlu adanya sosialisasi dari setiap calon kandidat agar mereka tahu kandidat yang akan dipilih dan untuk pemerintah bisa menyediakan alternatif agar mahasiswa dapat melakukan pilihan politiknya.
3. Pemerintah hendaknya memberikan sanksi yang tegas terhadap partai politik yang melakukan kecurangan dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arikunto S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta:

PT Rineka Cipta.

Faisal, Sanapiah. 2012. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Hasan, Ikkal. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Kusnardi, Moh. Dan Harmailiy Ibrahim. 1994. *Pengantar Hukum Tata Negara*

Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti.

Milles, M.B dan Huberman Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:

Universitas Indonesia Press.

Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah

Mada University Press.

Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rachman, Maman. 1999. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang:

IKIP Semarang Pers.

Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ridwan, Asep. 2000. *Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004*, Jurnal

Demokrasi dan HAM. Jakarta: The Habibie Center.

Syarbaini, Syahrial, dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sastroatmodjo, Sudiono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta.

Sugiyono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.

_____ 2011. *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung CV

Alvabeta.

Sutopo, HB. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Upe, Ambo. 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. Skripsi

Burhan. 2015. "Faktor-Faktor Yang Menentukan Pemilih Mahasiswa Asal Natuna Tahun 2015" Program Pasca Sarjana Universitas Tanjungpura Pontianak

Nikodemus. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Dalam

Pemilihan Kepala Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong

Tahun 2013”. Program
Pascasarjana Universitas Tanjungpura
Pontianak.

C. Internet

Undang-undang pemilu.
[http://www.rumahpemilu.org/in/read/91/
Undang](http://www.rumahpemilu.org/in/read/91/Undang)

undang-Pemilu-dan-Undang-

undang-Terkait-Pemilu/, diakses pada

tanggal 8 Nopember 2017

Jurnal. Laporan Riset Perilaku Pemilih
Di Kabupaten Barru. Sulawesi Selatan

Tahun 2015.

Jurnal. Perilaku Pemilih. Universitas
Sumatera Utara, 2015

